

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) semakin menjadi perhatian seiring berjalannya waktu. Perusahaan kini mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip ESG (*Environmental, Social and Governance*) yaitu tanggung jawab lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan sebagai bagian dari tujuan perusahaan. Prinsip ESG kini berkembang menjadi lebih baik di dunia praktisi maupun akademisi. Investor sangat mempertimbangkan ESG dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, US SIF Foundation melaporkan bahwa lebih dari \$11.6 triliun investasi dilihat menurut kriteria ESG nya dan jumlah ini meningkat 44% dari tahun 2016 (Gillan et al., 2021). Manfaat dari tindakan ESG adalah meningkatkan nilai perusahaan, kinerja keuangan, likuiditas saham, penurunan volatilitas dan biaya modal (ekuitas dan hutang) (Ratajczak & Mikolajewicz, 2021).

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berorientasi pada perubahan dengan tidak mengesampingkan pemeliharaan lingkungan, sumber daya manusia dan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan memiliki orientasi ke depan dan tidak melakukan eksploitasi massal tanpa batas atau bahkan akan merusak lingkungan. Perusahaan selaku agen pembangunan harus mampu menciptakan daya dukung dalam pembangunan berkelanjutan (Ratajczak & Mikolajewicz, 2021).

Bagi seorang manajer, nilai perusahaan merupakan tolak ukur atas prestasi kerja yang telah dicapainya. Peningkatan nilai perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan. Bagi investor, peningkatan nilai perusahaan akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan sehingga membuat harga saham mengalami peningkatan. Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya yang sering dihubungkan dengan harga saham. Nilai perusahaan merupakan suatu yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan peningkatan nilai perusahaan akan diikuti dengan peningkatan harga saham (Indrarini, 2019).

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan nilai yang baik akan bertahan lebih lama hingga ratusan tahun. Namun, seringkali menimbulkan celah dari benturan kepentingan antara perusahaan dengan pemegang saham yang jangka waktunya lebih pendek dari umur perusahaan. Umumnya, pemegang saham fokus pada peningkatan nilai perusahaan untuk periode jangka pendek dan hanya untuk mencari keuntungan. Mereka mengabaikan tujuan lain dari perusahaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan untuk melestarikan lingkungan. Kegiatan ekonomi dan pembangunan yang mengabaikan sosial dan lingkungan dampaknya akan menimbulkan masalah sosial, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan lain-lain (Visser et al., 2010).

Pengungkapan ESG dapat meningkatkan nilai perusahaan sebab teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan informasi kegiatan ESG sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap pihak *stakeholder* yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Pengungkapan ESG yang lebih luas dalam laporan tahunan merupakan sinyal positif yang diberikan perusahaan kepada *stakeholder* agar terjalin komunikasi yang baik diantara kedua pihak tersebut sehingga menimbulkan kepuasan dari *stakeholder*. Perusahaan yang dapat mempertahankan kepuasan dari *stakeholder*, maka perusahaan tersebut akan memperoleh penerimaan terhadap keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan juga mendapatkan dukungan dan persetujuan dari *stakeholder* terhadap kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan (Mardikanto, 2014).

Kasus menyita perhatian publik di perusahaan perbankan mengenai saham yaitu sektor perbankan terpantau ambruk pada perdagangan setelah pada tahun 2020 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memberlakukan kembali PSBB Total. Terpantau indeks sektor keuangan jatuh 5,74% bahkan indeks perbankan mengalami penurunan secara signifikan, dikarenakan banyak perbankan terkoreksi hingga menyentuh level *Auto Reject Bawah* (ARB) (www.cnbcindonesia.com/ diakses 10/09/2020).

Tabel 1. 1
***Auto Reject Bawah* Perusahaan Perbankan**

No	Emiten	%Change
1	BNGA	-6,93%
2	BMRI	-6,93%
3	BBNI	-6,87%

No	Emiten	%Change
4	BBRI	-6,74%
5	BBTN	-6,74%
6	BBCA	-4,40%

Sumber : www.cnbcindonesia.com/

Kasus lainnya yaitu saham-saham perbankan telah menjadi sorotan para investor pada beberapa perdangan terakhir, hal ini menjadi sorotan otoritas berujung sejumlah saham terpaksa digembok. Sepanjang tahun 2021 indeks saham sektor keuangan mencatat kenaikan, pergerakan itu menjadikan kenaikan terbaik di antara indeks *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) lainnya (<https://m.bisnis.com/> diakses 05/03/2021). Kasus lainnya akibat pandemi *covid-19* terjadi perlambatan dalam hal ekonomi, walaupun hal ini terjadi tingkat permodalan bank di Indonesia masih dikategorikasn kokoh, hal ini terlihat dari peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa CAR perbankan terus meningkat sekitar 24,58% (<https://amp.kontan.co.id/> diakses 09/10/2021).

Fenomena tersebut dapat menggambarkan bagaimana pentingnya peran perusahaan terhadap sosial dan lingkungan tempat perusahaan tersebut berada. Perusahaan tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis yang mengejar kesuksesan finansial, tetapi juga sebagai perusahaan yang baik konsep ini menegaskan bahwa perusahaan harus memperluas tanggung jawab dalam aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, serta warga negara lainnya sehingga dapat meminimalisasi pengaruh negatif dari kegiatan perusahaan (Visser et al, 2010).

Duta Besar Millenium Development Goals (MDGs) menegaskan bahwa kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pengembangan Indonesia tidak hanya ditentukan lewat kegiatan bisnis saja, tetapi juga pada cakupan kontribusi yang diberikan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut berada. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan apa yang disebut tanggung jawab sosial yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, dan menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. Dengan hal ini menyebutkan bahwa perusahaan perlu membangun nilai yang tidak hanya didasarkan pada penciptaan nilai secara ekonomi, namun harus memasukkan pertanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat (Hadi, 2018:167).

Berbagai kelompok pemangku kepentingan perusahaan telah melakukan tekanan pada perusahaan untuk melampaui tingkat yang diwajibkan secara hukum tentang lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) untuk mempraktekkan dan meningkatkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Tren tersebut ditemukan oleh Survei Global Nielsen tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa 66% konsumen global bersedia membayar lebih untuk merek yang berkelanjutan dibandingkan dengan 55% pada tahun 2014, dan bahwa 73% dari milenium global bersedia membayar ekstra untuk penawaran berkelanjutan dibandingkan dengan 50% pada tahun 2014. Dalam hal ini, sebagian besar penelitian berbasis pasar saat ini berpendapat bahwa pengungkapan ESG yang efisien meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan

membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan perusahaan. Menurut sebuah studi baru-baru ini oleh PBB, 89% CEO dari lebih dari 100 negara percaya bahwa komitmen terhadap praktik ESG diterjemahkan ke dalam dampak nyata dalam hal keberhasilan keuangan perusahaan mereka (Eliwa et al., 2019).

Banyak perusahaan telah melibatkan dirinya sebagai perusahaan dengan kantor hijau, *go green*, *product green*, dan sejenisnya. Tanggung jawab sosial pun dijadikan jargon operasi untuk dapat memikat para pemangku kepentingan, khususnya konsumen (Hadi, 2018:204). *Sustainable development* memberikan rangkaian bagi perusahaan untuk tetap mampu mengantisipasi dan mengurangi munculnya ancaman yang disebabkan oleh lingkungan dan bencana alam serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial masyarakat (Hadi, 2018:204).

Perhatian terhadap isu-isu keberlanjutan telah tumbuh secara signifikan belakangan ini. Pemangku kepentingan semakin menekan perusahaan untuk memiliki peran lebih terhadap masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan keberlanjutan melalui kebijakan pengungkapan yang memadai. Pengungkapan juga dianggap penting bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia dengan berdasarkan interkoneksi yang ada antara ekonomi dunia melalui investasi dan perdagangan internasional. Namun, dalam hal ini pengungkapan keuangan saja tidak dapat memenuhi informasi kebutuhan pemangku kepentingan, pembuat kebijakan dan investor. Oleh karena itu, pengungkapan non-keuangan terutama dalam bentuk laporan lingkungan, laporan sosial, laporan keberlanjutan, dan laporan terintegrasi menjadi semakin penting (Raimo et al., 2021). Temuan ini menyoroti pentingnya

pelaporan keberlanjutan dalam memotivasi bisnis di Indonesia untuk menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Akibatnya, sektor perbankan mulai menempatkan fokus yang lebih tinggi pada nilai lingkungan dan sosial di samping nilai finansial untuk bertahan. Dengan kata lain, isu keberlanjutan menjadi semakin penting untuk masyarakat (Wanta & Herawati, 2021).

Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan telah dimulai dalam rangka mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan keseimbangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan dunia perbankan yang merupakan lembaga keuangan yang bergantung pada kepercayaan. Industri perbankan wajib menjaga kepercayaan dan risiko dengan benar, serta jujur saat membuat laporan keuangan. Industri perbankan merupakan organisasi keuangan yang menghimpun dana dari nasabah untuk pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menjadi prioritas keberlanjutan dalam operasi bisnisnya (Wanta & Herawati, 2021)

Pemerintah juga memandang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan munculnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” (selanjutnya disebut UU PT). Dalam undang-undang perseroan terbatas, ketentuan yang berkaitan dengan CSR diatur dalam pasal 74. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan komersial di bidang ini dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam harus memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana kewajiban dianggarkan dan dibebankan sebagai beban

perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan rasa hormat dan kewajaran. Jika mereka gagal memenuhi kewajiban ini, mereka akan dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. (Syafurullah & Muharam, 2017).

Laporan keberlanjutan disusun pada awal tahun 2017 berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan, sebagaimana diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1. Namun, sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan pelaporan kinerja keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan, khususnya bagi lembaga jasa keuangan. berbasis di Indonesia. Emiten dan perusahaan publik, serta penyedia jasa keuangan, tunduk pada aturan ini (Wanta & Herawati, 2021).

POJK Keuangan Berkelanjutan diterbitkan sebagai aturan khusus yang berkaitan dengan keberlanjutan pelaporan yang wajib diikuti oleh seluruh pelaku industri jasa keuangan. Bank adalah salah satu lembaga keuangan entitas yang harus mengadopsi keuangan berkelanjutan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan total industri jasa keuangan untuk jangka panjang (Wanta & Herawati, 2021).

Perusahaan juga perlu membangun nilai lewat kedekatan terhadap *stakeholders*, seperti konsumen, supplier, pemerintah, investor, masyarakat, tenaga kerja dan lingkungan. Upaya membangun kedekatan tersebut dapat dilakukan

dengan berbasis aktivitas strategi legitimasi seperti memegang etika bisnis, memegang integritas, keterbukaan, kepatuhan terhadap aturan. Strategi berbasis *stakeholders* dapat membangun nilai perusahaan dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan *stakeholders* dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan (Hadi, 2018:166).

Sejauh mana suatu perusahaan mendapat keuntungan atau kerugian kesejahteraan sosial telah mendapat perhatian dari banyak pihak. Aksi perusahaan ini dalam hal ini sering disebut sebagai *environmental, social* dan *governance* (ESG) (Gillan et al., 2020). Isu ESG pada perusahaan merupakan bagian dari risiko sistematis sehingga dapat mengganggu operasi bisnis jika salah dalam pengelolaannya. Dengan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan nilai ESG yang baik dapat menguntungkan perusahaan karena biaya ekuitas yang lebih rendah (Ratajczak & Mikolajewicz, 2021). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada *single bottom line* yang menjalankan aktivitas perusahaan hanya untuk mendapatkan keuntungan melainkan harus *triple bottom lines* yaitu aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Kinerja perusahaan tidak hanya dapat diukur melalui keuntungan yang didapat oleh perusahaan, namun kesuksesan suatu perusahaan juga diukur dari seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Perusahaan yang ingin menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainability*), tidak cukup hanya mengandalkan kondisi keuangan saja tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Selain itu, tata kelola

perusahaan yang baik merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat keberhasilan perusahaan (Ratajczak & Mikolajewicz, 2021).

Konsep tata kelola perusahaan berkembang seiring berjalannya waktu dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang bersih, sehat dan bertanggung jawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Ada dua hal yang ditekankan dalam tata kelola perusahaan, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara tepat waktu, akurat, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, *stakeholders* (Sochib, 2016:25).

Industri perbankan dalam melaksanakan tugasnya harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perbankan berdasarkan ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi perbankan sebagai cerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) (Sochib, 2016:27).

Dalam dekade terakhir, perhatian juga terus meningkat terhadap isu ‘*Sustainability*’ yang telah menyebabkan ledakan pengungkapan informasi

perusahaan pada praktik lingkungan, sosial dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*). Menurut inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *Sustainable Stock Exchange* (SSE), semua perusahaan besar diharapkan melaporkan dampaknya dari praktik lingkungan dan sosial paling lambat 2030 (SSE, 2015). Bukti ini menunjukkan bahwa minat pasar terhadap transparansi kinerja dan praktik ESG perusahaan sudah besar dan bertumbuh (Eccles, Serafeim, & Krzus, 2011).

Menurut Raimo et al., (2021) indikator yang terdapat pada variabel ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dengan mempertimbangkan berbagai aspek di dalamnya. Indikator kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan *environmental disclosure score* yang dilihat dari aktivitas operasional perusahaan serta dampaknya terhadap lingkungan, seperti emisi karbon, emisi gas rumah kaca, pengungkapan atau pengukuran, pelaporan, perubahan iklim (risiko yang disebabkan oleh operasional perusahaan), perubahan ekosistem, fasilitas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pemberian izin usaha, polusi, energi yang terbarukan, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia yang beracun, dan lain-lain.

Kinerja sosial perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *social disclosure score* yang dilihat dari beberapa indikator, seperti jumlah pekerja, berapa jumlah keluar masuk pekerja, berapa jumlah wanita dalam manajemen, kecelekaan kerja, investasi pada keberlanjutan, kebijakan hak asasi manusia, jumlah penghargaan social, donasi politik dll.

Sedangkan tata kelola (*governance*) perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *governance disclosure score* yang dilihat dari beberapa indikator, seperti ukuran dewan, jumlah komisaris independen, rata-rata umur dewan, rapat komite audit, berapa persen jumlah kehadiran rapat dewan dll.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap nilai perusahaan yang pernah dilakukan seperti pada penelitian mengenai hubungan antara lingkungan terhadap nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Plumlee et al., (2015); Aboud & Diab (2018); Brooks & Oikonomou (2018); Fatemi et al., (2018); Yiwei Li et al., (2018); Safriani & Utomo (2019); Zhenghui et al., (2019); Melinda & Wardhani (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh Erkanawati (2018) yang menyatakan bahwa lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian sebelumnya mengenai hubungan sosial terhadap nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Aboud & Diab (2018); Brooks & Oikonomou (2018); Fatemi et al., (2018); Yiwei Li et al., (2018); Safriani & Utomo (2019); Zhenghui et al., (2019); Melinda & Wardhani (2020) yang menyatakan bahwa sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh Erkanawati (2018) yang menyatakan bahwa sosial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian sebelumnya terkait hubungan tata kelola terhadap nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Aboud & Diab (2018); Brooks & Oikonomou (2018); Fatemi et al., (2018); Yiwei Li et al., (2018); Safriani & Utomo (2019); Zhenghui et al., (2019); Melinda & Wardhani (2020) yang menyatakan bahwa tata kelola berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil

yang berbeda dinyatakan oleh Erkanawati (2018) yang menyatakan bahwa tata kelola tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Penelitian ini masih sangat jarang dilakukan. Beberapa penelitian tentang pengaruh ESG terhadap nilai perusahaan telah dilakukan namun hasilnya sangat belum memadai. Selain itu, hasil dari penelitian sebelumnya tidak konsisten dan belum lengkap secara keseluruhan. Penelitian ini dikembangkan untuk menguji kembali pengaruh *environmental*, *social* dan *corporate governance* terhadap nilai perusahaan dengan kondisi, waktu dan objek penelitian yang berbeda. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.

Alasan yang membuat penulis tertarik mengangkat topik ini untuk dibahas yaitu sesuai pemaparan Ratajczak & Mikolajewicz (2021) yaitu tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada *single bottom line* yang hanya untuk mendapatkan keuntungan melainkan harus *triple bottom lines* yaitu aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Kinerja perusahaan tidak hanya dapat diukur melalui keuntungan yang didapat oleh perusahaan, namun kesuksesan suatu perusahaan juga diukur dari seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penelitian ini memilih perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena beberapa alasan yaitu karena sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dan perbankan merupakan salah satu sektor yang

mempunyai peran yang cukup besar dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara serta melihat dari kegiatan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari jasa yang diberikan oleh perbankan. Sektor perbankan saat ini sudah banyak yang go public sehingga akan memudahkan peneliti untuk melihat posisi keuangan suatu bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh pengungkapan Environmental, Social dan Governance terhadap nilai perusahaan (studi empiris perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020)”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul saat ini adalah:

- (1) Mengidentifikasi peningkatan nilai perusahaan yang diikuti dengan peningkatan harga saham yang mencerminkan kemakmuran pemegang saham.
- (2) Mengidentifikasi tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar dengan tetap berkomitmen memproduksi barang dan jasa yang ramah lingkungan.
- (3) Mengidentifikasi tanggung jawab perusahaan dengan menyediakan tempat kerja dan lingkungan yang baik, pelatihan keterampilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia.

- (4) Mengidentifikasi sistem yang mengatur dan mengendalikan tata kelola perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk *stakeholders*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

- (1) Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- (2) Faktor yang diteliti adalah *Environmental, Sosial, Governance*, Nilai Perusahaan.
- (3) Penelitian hanya membahas variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan PBV, variabel independen yaitu lingkungan yang diukur dengan *environmental disclosure score* yang dilihat dari aktivitas operasional perusahaan serta dampaknya terhadap lingkungan, sosial yang diukur dengan menggunakan *social disclosure score* yang dilihat dari beberapa indikator sosial, tata kelola yang diukur dengan menggunakan *governance disclosure score* yang dilihat dari beberapa indikator.
- (4) Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa dari laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan di perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

- (1) Apakah kinerja lingkungan (*environmental*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?
- (2) Apakah kinerja sosial (*Social*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?
- (3) Apakah tata kelola (*Governance*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- (1) Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan (*environmental*) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.
- (2) Untuk mengetahui pengaruh kinerja sosial (*Social*) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.
- (3) Untuk mengetahui pengaruh tata kelola (*Governance*) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat menghantarkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Menyediakan informasi yang berkaitan dengan *Environmental, Social, Governance*, nilai perusahaan yang dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dan praktisi di bidang akuntansi di masa yang akan datang.
- (2) Diharapkan dapat memberi manfaat kontribusi dalam pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan praktik pengungkapan sosial dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
- (3) Bagi masyarakat, akan memberikan rangsangan secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.